



**BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 29 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DANA ADVOKASI HUKUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memacu dan memotivasi kerja yang maksimal terhadap advokat/pengacara/konsultan hukum dalam melaksanakan tugas baik litigasi maupun nonlitigasi yang telah ditunjuk oleh Bupati Ogan Ilir, ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dana Advokasi Hukum, perlu ditinjau ulang untuk diadakan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5077);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Daerah Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5075);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN ILIR NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DANA ADVOKASI HUKUM.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Advokasi Hukum (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2014 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Pembayaran dana atas jasa advokasi hukum dibayarkan sekaligus 100% (seratus persen) dari nilai kontrak termasuk biaya administrasi, PPN dan Pajak lain yang sah.
- (2) Pembayaran dana atas jasa advokasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak advokat/pengacara/konsultan hukum yang beracara di pengadilan atau di luar pengadilan, wajib melampirkan:
  - a. Surat Kuasa Khusus dari Bupati Ogan Ilir yang sudah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
  - b. Kontrak yang sudah ditandatangani;
  - c. Laporan Pelaksanaan Kegiatan; dan
  - d. Hal lain yang diperlukan berkenaan dengan pencairan dana dimaksud.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 28 Juni 2016

Pt. BUPATI OGAN ILIR

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR

HERMAN